

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan masih menjadi salah satu dari banyak problema ekonomi di banyak negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir,2008). Berdasar pada pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang mana kesejahteraan umum ini ialah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum dapat digambarkan dengan berdasar pada tingkat kemiskinan hal ini karena tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif terhadap kesejahteraan umum, dimana semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Data BPS tahun 2021 menunjukan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan sebesar 27,4% namun jika melihat dari jumlah, lebih dari setengah populasi penduduk miskin terkonsentrasi di pulau Jawa. Dari 26 juta penduduk miskin di Indonesia sekitar 53% di antaranya berada di pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat

pada bulan september tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan naik dari 7,97% menjadi 7,98%. Meskipun peningkatannya hanya 0,01% namun dengan jumlah penduduknya yang banyak, naiknya tingkat kemiskinan ini akan terlihat.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, dimana tingkat kemiskinan di daerah kabupaten cenderung lebih tinggi dari daerah kota sebagaimana yang terdapat pada tabel tingkat kemiskinan di bawah ini :

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2022**

| No. | Wilayah     | Tingkat | No. | Wilayah          | Tingkat |
|-----|-------------|---------|-----|------------------|---------|
| 1   | Bogor       | 7,73%   | 15  | Karawang         | 8,44%   |
| 2   | Sukabumi    | 7,34%   | 16  | Bekasi           | 5,01%   |
| 3   | Cianjur     | 10,55%  | 17  | Bandung Barat    | 10,82%  |
| 4   | Bandung     | 6,80%   | 18  | Pangandaran      | 9,32%   |
| 5   | Garut       | 10,42%  | 19  | Kota Bogor       | 7,10%   |
| 6   | Tasikmalaya | 10,73%  | 20  | Kota Sukabumi    | 8,02%   |
| 7   | Ciamis      | 7,72%   | 21  | Kota Bandung     | 4,25%   |
| 8   | Kuningan    | 12,76%  | 22  | Kota Cirebon     | 9,82%   |
| 9   | Cirebon     | 12,01%  | 23  | Kota Bekasi      | 4,43%   |
| 10  | Majalengka  | 11,94%  | 24  | Kota Depok       | 2,53%   |
| 11  | Sumedang    | 10,14%  | 25  | Kota Cimahi      | 5,11%   |
| 12  | Indramayu   | 12,77%  | 26  | Kota Tasikmalaya | 12,72%  |
| 13  | Subang      | 9,75%   | 27  | Kota Banjar      | 6,73%   |
| 14  | Purwakarta  | 8,70%   |     |                  |         |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1, kota Tasikmalaya menjadi kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Daerah kabupatennya juga memiliki tingkat kemiskinan di atas 10% sehingga menjadikannya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Selain itu, daerah sekitar Tasikmalaya yang

termasuk kedalam wilayah Priangan Timur seperti Garut dan Pangandaran juga memiliki tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan Provinsi. Hal ini menjadikan Priangan Timur sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup mencolok. Bahkan kota Tasikmalaya sempat menjadi kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2021. Tingginya tingkat kemiskinan di Priangan Timur ini bisa di sebabkan oleh berbagai faktor. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan buta huruf, pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Larasati Prayoga et al. (2021) juga menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Pendidikan memegang peranan krusial dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sri Purnomo, Bupati Sleman “Salah satu yang berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan yaitu dengan pendidikan yang memadai. Memaksimalkan pendidikan anak perlu diupayakan”. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (*Bloom*, 2006). Menurut *Gillis* (2000) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting. Pertama karena banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Kedua, karena banyak hasil observasi yang menyatakan

bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan status sosial di masyarakat akan terangkat. Dengan kata lain pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan meningkatkan peluang kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

**Tabel 1.2 Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020-2022**

| Daerah                | Tahun |      |      |
|-----------------------|-------|------|------|
|                       | 2020  | 2021 | 2022 |
| Kabupaten Garut       | 7,52  | 7,53 | 7,83 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 7,35  | 7,48 | 7,73 |
| Kabupaten Ciamis      | 7,7   | 7,9  | 8    |
| Kabupaten Pangandaran | 7,74  | 7,85 | 8,03 |
| Kota Tasikmalaya      | 9,33  | 9,52 | 9,53 |
| Kota Banjar           | 8,63  | 8,77 | 8,78 |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Kualitas pendidikan Priangan Timur bisa dilihat dari data rata-rata lama sekolah yang ada pada tabel diatas. Rata-rata lama sekolah daerah Priangan Timur selalu meningkat namun peningkatannya masih sedikit. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah provinsi Jawa Barat, Priangan Timur masih berada di bawah rata-rata lama sekolah tingkat provinsi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifqi pada tahun 2020 di Yogyakarta, secara parsial pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Yogyakarta. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh *Bloom* mengenai pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain pendidikan faktor penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh *World Bank* adalah upah. Upah rendah yang diterima oleh masyarakat berpengaruh

pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat di suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan.

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar yang ditetapkan pemerintah agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Yang mana upah minimum kenaikannya ditetapkan setahun sekali. UMK daerah Priangan Timur terus bertambah dari tahun-ketahun, dengan Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan UMK tertinggi sebesar Rp. 2,36 Juta dan sebaliknya kota Banjar, mempunyai UMK terendah dengan jumlah Rp. 1,85 Juta pada tahun 2022. Sebagaimana yang tertera pada tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3 UMK di Wilayah Priangan Timur tahun 2020-2022 (dalam Ribu)**

| Daerah                | Tahun       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 2020        | 2021        | 2022        |
| Kabupaten Garut       | Rp 1.961,09 | Rp 1.961,09 | Rp 1.975,22 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.251,79 | Rp 2.251,79 | Rp 2.326,77 |
| Kabupaten Ciamis      | Rp 1.880,66 | Rp 1.880,66 | Rp 1.897,87 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp 1.860,59 | Rp 1.860,59 | Rp 1.884,36 |
| Kota Tasikmalaya      | Rp 2.264,09 | Rp 2.264,09 | Rp 2.363,39 |
| Kota Banjar           | Rp 1.831,89 | Rp 1.831,89 | Rp 1.852,10 |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Rendahnya pendapatan akan berhubungan dengan pengangguran, dimana pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, akibatnya akan berefek pada berkurangnya tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain, yaitu kemiskinan (Sadono Sukirno, 2003). Menurut *World Bank* (2004) salah satu

sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Berikut ini adalah tabel data tingkat pengangguran yang terjadi di wilayah Priangan Timur pada tahun 2020-2022

**Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran di Wilayah Priangan Timur tahun 2020-2022**

| Daerah           | Tahun |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Garut            | 8,95% | 8,68% | 7,6%  |
| Tasikmalaya      | 7,12% | 6,16% | 4,17% |
| Ciamis           | 5,66% | 5,06% | 3,75% |
| Pangandaran      | 5,08% | 3,25% | 1,56% |
| Kota Tasikmalaya | 7,99% | 7,66% | 6,62% |
| Kota Banjar      | 6,73% | 6,09% | 5,53% |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Kondisi pengangguran di Priangan Timur dari tahun ketahun kian menurun, dengan Pangandaran menjadi daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Priangan Timur. Tingkat kemiskinannya turun ke 1,56% di tahun 2022 dari 3,25%% di tahun sebelumnya. Garut yang merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi juga berhasil menurunkan pengangguran meskipun pada tahun 2022 masih berada pada tingkat 7,6%.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah *Dependency ratio* (DR). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator

demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15 - 64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Rasio ketergantungan dipicu oleh jumlah kelahiran yang tinggi sehingga penduduk usia *non*-produktif bertambah. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban tanggungan suatu negara atau daerah, semakin rendah partisipasi penduduk dalam proses pembangunan (BPS, 2017). Apabila pendapatan tenaga kerja sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggungan maka pembangunan akan terhambat karena salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembangunan adalah dana dari masyarakat. meningkatnya rasio ini penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka beban tanggungan. *Dependency ratio* Priangan Timur ditunjukkan pada tabel 1.5

**Tabel 1.5 *Dependency ratio* wilayah Priangan Timur tahun 2020-2022**

| Daerah                | Tahun |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
|                       | 2020  | 2021  | 2022  |
| Kabupaten Garut       | 57,5  | 58,32 | 47,16 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 52,49 | 52,49 | 45,72 |
| Kabupaten Ciamis      | 49,34 | 49,54 | 46,53 |
| Kabupaten Pangandaran | 46,97 | 46,97 | 44,6  |
| Kota Tasikmalaya      | 46,55 | 46,55 | 45,57 |
| Kota Banjar           | 48,05 | 48,05 | 44,64 |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa *dependency ratio* tiap tahunnya berkurang, artinya beban tanggungan ekonomi penduduk cenderung berkurang. pada tahun 2020 Garut memiliki *dependency ratio* sebesar 57,5%. Artinya, 100 orang penduduk produktif di Garut harus menanggung 57 orang penduduk *non*-produktif. *Dependency ratio* yang baik adalah yang berada di bawah 50%. Pada tahun 2022 semua daerah Priangan Timur angka DR nya berada di bawah 50% namun Garut dan Ciamis angka DR nya masih mendekati 50%.

Berdasar pada uraian yang telah disampaikan, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang menyangkut berbagai aspek kehidupan yang tidak terlepas satu sama lain dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian yang di beri judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH PRIANGAN TIMUR TAHUN 2016-2021” ini dilaksanakan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, di rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut untuk dibahas pada bab pembahasan :

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran dan *dependency ratio* secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Priangan Timur tahun 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran dan *dependency ratio* secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Priangan Timur tahun 2016-2021?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran dan *dependency ratio* secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Priangan Timur tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran dan *dependency ratio* secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Priangan Timur tahun 2016-2021.

### 1.4. Kegunaan penelitian

#### 1.4.1. Kegunaan pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan untuk bidang ekonomi mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Juga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka pembuatan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan

## 1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Priangan Timur yang meliputi kabupaten dan kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Ciamis
2. Kabupaten Garut
3. Kabupaten Pangandaran
4. Kabupaten Tasikmalaya
5. Kota Banjar
6. Kota Tasikmalaya

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang di terbitkan oleh BPS dan *website* pemerintah lainnya. Variabel data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pendidikan yang di ukur dengan rata lama sekolah, tingkat pengangguran yang di ukur dengan tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupaten/kota dan *dependency ratio*

### 1.5.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi tentang informasi waktu dalam setiap proses pembuatan penelitian. Disajikan dalam bentuk tabel runtut waktu dengan keterangan kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian. Berikut proses pelaksanaan penelitian ini disajikan pada tabel 1.6

